



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190  
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/1077/KT.03/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pelaksanaan Penilaian Interview Evaluasi  
SPBE Tahun 2023**

06 September 2023

Yth.

**Daftar Terlampir**

di

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Penilaian Mandiri pada evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023, bersama ini kami sampaikan agenda kegiatan penilaian interview sebagai salah satu tahapan dari kegiatan evaluasi SPBE yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Perlu kami informasikan bahwa kegiatan Penilaian Interview evaluasi SPBE tahun 2023 akan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 29 September 2023 secara daring. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perwakilan Tim Asesor Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat mengikuti agenda kegiatan penilaian interview evaluasi SPBE sesuai dengan jadwal dan ketentuan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Kelembagaan  
dan Tata Laksana**

**NANIK MURWATI**

## DAFTAR PENERIMA SURAT

### **Kementerian**

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
26. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
27. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
28. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
29. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
30. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
31. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
32. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
33. Sekretaris Kementerian Investasi/Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal;
34. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.

## **DAFTAR PENERIMA SURAT**

### **Lembaga Pemerintah Non Kementrian**

1. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional
2. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
3. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
4. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
5. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
6. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
7. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
8. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
9. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI
11. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
12. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
13. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
14. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional RI
15. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
16. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
17. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
18. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
19. Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
20. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
21. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
22. Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
23. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional

## DAFTAR PENERIMA SURAT

### **Lembaga Negara**

1. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Sekretaris Jenderal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Sekretaris Jenderal Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah;
5. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
8. Jaksa Agung Muda Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara;
11. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet;
12. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

## **DAFTAR PENERIMA SURAT**

### **Lembaga Non Struktural**

1. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Pemilihan Umum
3. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
4. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
6. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
7. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
8. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
9. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
10. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia
11. Sekretaris Komisi Kejaksaan
12. Sekretaris Komisi Aparatur Sipil Negara
13. Sekretaris Dewan Pers
14. Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional
15. Sekretariat Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi
16. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
17. Sekretaris Lembaga Sensor Film
18. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
19. Sekretariat Kantor Staf Presiden
20. Direktur Utama Televisi Republik Indonesia
21. Direktur Radio Republik Indonesia
22. Deputy Bidang Kebijakan Strategis Badan Pengusahaan Batam
23. Deputy Umum Badan Pengusahaan Sabang

## DAFTAR PENERIMA SURAT

### **Provinsi**

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Aceh;
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau;
5. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi;
7. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu;
10. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
11. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
13. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten;
14. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
15. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
17. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali;
18. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
21. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
24. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
25. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
27. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
29. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
30. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo;
31. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku;
32. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
33. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat;
34. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua;

## **DAFTAR PENERIMA SURAT**

### **Kabupaten/Kota**

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
7. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
8. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
9. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Agam;
10. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Alor;
11. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan;
12. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Badung;
13. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan;
14. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung;
15. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
16. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai;
17. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
18. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut;
19. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;
20. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
21. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
22. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
23. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
24. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli;
25. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar;
26. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
27. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
28. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul;
29. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
30. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
31. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
32. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
33. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
34. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
35. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
36. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barru;
37. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Batang;
38. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Batanghari;
39. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
40. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
41. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung;
42. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
43. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Belu;
44. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
45. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

46. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
47. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
48. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
49. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
50. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Berau;
51. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bima;
52. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen;
53. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar;
54. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Blora;
55. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
56. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor;
57. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
58. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
59. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
60. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
61. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana;
62. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
63. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bone;
64. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
65. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali;
66. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes;
67. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng;
68. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
69. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan;
70. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo;
71. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buol;
72. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buru;
73. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buton;
74. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
75. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
76. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
77. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
78. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
79. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap;
80. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
81. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
82. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Demak;
83. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
84. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dompu;
85. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala;
86. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
87. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ende;
88. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Enrekang;
89. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak;
90. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
91. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Garut;
92. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
93. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar;



94. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
95. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
96. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa;
97. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik;
98. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan;
99. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul;
100. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
101. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
102. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
103. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
104. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
105. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
106. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
107. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
108. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
109. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
110. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu;
111. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
112. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
113. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jember;
114. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana;
115. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jenepono;
116. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara;
117. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang;
118. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar;
119. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
120. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
121. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
122. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem;
123. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang;
124. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun;
125. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karo;
126. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan;
127. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur;
128. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
129. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
130. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri;
131. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom;
132. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal;
133. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
134. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
135. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Bintan;
136. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
137. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
138. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

139. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
140. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
141. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
142. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;
143. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang;
144. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten;
145. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung;
146. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
147. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
148. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe;
149. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
150. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
151. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
152. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
153. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
154. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
155. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
156. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
157. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus;
158. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
159. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
160. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang;
161. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
162. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
163. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
164. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
165. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
166. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
167. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat;
168. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau;
169. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan;
170. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
171. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
172. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
173. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
174. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
175. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Landak;
176. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat;
177. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak;
178. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong;
179. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata;
180. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
181. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga;
182. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
183. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

184. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
185. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
186. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang;
187. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu;
188. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
189. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
190. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun;
191. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang;
192. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan;
193. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
194. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka;
195. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Majene;
196. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Malaka;
197. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Malang;
198. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau;
199. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
200. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
201. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
202. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
203. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa;
204. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju;
205. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
206. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;
207. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai;
208. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
209. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur;
210. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari;
211. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan;
212. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maros;
213. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi;
214. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah;
215. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin;
216. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mesuji;
217. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika;
218. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa;
219. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
220. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
221. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
222. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali;
223. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
224. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
225. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
226. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
227. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
228. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya;

229. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;  
230. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;  
231. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;  
232. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo;  
233. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna;  
234. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ngada;  
235. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk;  
236. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi;  
237. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nias;  
238. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan;  
239. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;  
240. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
241. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;  
242. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;  
243. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;  
244. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan;  
245. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;  
246. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;  
247. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;  
248. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;  
249. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan;  
250. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang;  
251. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran;  
252. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;  
253. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;  
254. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu;  
255. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Paser;  
256. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;  
257. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pati;  
258. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan;  
259. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pematang;  
260. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;  
261. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;  
262. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran;  
263. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;  
264. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;  
265. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie;  
266. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;  
267. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato;  
268. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;  
269. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo;  
270. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Poso;  
271. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu;  
272. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo;  
273. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

274. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu;  
275. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;  
276. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;  
277. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;  
278. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo;  
279. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;  
280. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;  
281. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;  
282. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;  
283. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;  
284. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas;  
285. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir;  
286. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang;  
287. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau;  
288. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun;  
289. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau;  
290. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma;  
291. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang;  
292. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;  
293. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Serang;  
294. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;  
295. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan;  
296. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Siak;  
297. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;  
298. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;  
299. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi;  
300. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sijunjung;  
301. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka;  
302. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue;  
303. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai;  
304. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang;  
305. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo;  
306. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;  
307. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Solok;  
308. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;  
309. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;  
310. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong;  
311. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen;  
312. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Subang;  
313. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;  
314. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara;  
315. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;  
316. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;  
317. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya;  
318. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;

319. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;  
320. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa;  
321. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;  
322. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang;  
323. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep;  
324. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong;  
325. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan;  
326. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar;  
327. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;  
328. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;  
329. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;  
330. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;  
331. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;  
332. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang;  
333. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus;  
334. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;  
335. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;  
336. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;  
337. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;  
338. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin;  
339. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;  
340. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo;  
341. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal;  
342. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;  
343. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung;  
344. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;  
345. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;  
346. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;  
347. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tolitoli;  
348. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;  
349. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek;  
350. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban;  
351. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;  
352. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;  
353. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;  
354. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo;  
355. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi;  
356. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;  
357. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri;  
358. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;  
359. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Ambon;  
360. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Balikpapan;  
361. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh;  
362. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung;  
363. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung;

364. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjar;
365. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru;
366. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
367. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Batam;
368. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Batu;
369. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Baubau;
370. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
371. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bengkulu;
372. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bima;
373. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Binjai;
374. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bitung;
375. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Blitar;
376. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bogor;
377. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bontang;
378. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi;
379. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cilegon;
380. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cimahi;
381. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cirebon;
382. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Denpasar;
383. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Depok;
384. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Dumai;
385. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Gorontalo;
386. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli;
387. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Jambi;
388. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Jayapura;
389. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kediri;
390. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kendari;
391. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu;
392. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kupang;
393. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Langsa;
394. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau;
395. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Madiun;
396. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Magelang;
397. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Makassar;
398. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Malang;
399. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Manado;
400. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Mataram;
401. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Medan;
402. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Metro;
403. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Mojokerto;
404. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Padang;
405. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang;
406. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan;
407. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam;
408. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya;

409. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palembang;  
410. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palopo;  
411. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palu;  
412. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pangkal Pinang;  
413. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Parepare;  
414. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman;  
415. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pasuruan;  
416. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh;  
417. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pekalongan;  
418. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru;  
419. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar;  
420. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pontianak;  
421. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Prabumulih;  
422. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Probolinggo;  
423. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sabang;  
424. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Salatiga;  
425. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda;  
426. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto;  
427. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Semarang;  
428. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Serang;  
429. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sibolga;  
430. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Singkawang;  
431. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Solok;  
432. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sukabumi;  
433. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh;  
434. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya;  
435. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surakarta;  
436. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang;  
437. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan;  
438. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai;  
439. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang;  
440. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tarakan;  
441. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya;  
442. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;  
443. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tegal;  
444. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Ternate;  
445. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;  
446. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tomohon;  
447. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tual;  
448. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta



**DAFTAR PENERIMA SURAT**

**Perguruan Tinggi (Tembusan)**

1. Asesor Eksternal Universitas Indonesia,
2. Asesor Eksternal Universitas Gadjah Mada,
3. Asesor Eksternal Universitas Gunadarma,
4. Asesor Eksternal Universitas Telkom,
5. Asesor Eksternal Politeknik Elektronika Negeri Surabaya,
6. Asesor Eksternal Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
7. Asesor Eksternal Institut Pertanian Bogor,
8. Asesor Eksternal Institut Teknologi Bandung,
9. Asesor Eksternal Universitas Ahmad Dahlan,
10. Asesor Eksternal Universitas Airlangga,
11. Asesor Eksternal Universitas Brawijaya,
12. Asesor Eksternal Universitas Bina Nusantara,
13. Asesor Eksternal Universitas Diponegoro,
14. Asesor Eksternal Universitas Esa Unggul,
15. Asesor Eksternal Universitas Hasanuddin,
16. Asesor Eksternal Universitas Islam Indonesia,
17. Asesor Eksternal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
18. Asesor Eksternal Universitas Kristen Petra,
19. Asesor Eksternal Universitas Kristen Satya Wacana,
20. Asesor Eksternal Universitas Padjadjaran,
21. Asesor Eksternal Universitas Sumatera Utara,
22. Asesor Eksternal Universitas Surabaya,
23. Asesor Eksternal Universitas Tarumanagara,
24. Asesor Eksternal Universitas Trunojoyo Madura,
25. Asesor Eksternal Universitas Udayana,
26. Asesor Eksternal Universitas Negeri Surabaya,
27. Asesor Eksternal Universitas Sebelas Maret,
28. Asesor Eksternal Politeknik Caltex Riau,
29. Asesor Eksternal Politeknik Negeri Padang,
30. Asesor Eksternal Institut Teknologi Kalimantan.

Lampiran II.  
Nomor : B/1077/KT.03/2023  
Tanggal : 06 September 2023

**AGENDA TENTATIF PENILAIAN INTERVIU EVALUASI SPBE TAHUN 2023**

**Senin, 11 September 2023**

No.	Agenda	Pukul	Keterangan
1	Pembukaan dan Arahan	07.30 - 08.00	<b>Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana</b>
2	Penilaian Interviu Sesi I	08.00 – 10.00	<b>Asesor Eksternal dan IPPD</b>
3	Penilaian Interviu Sesi II	10.00 – 12.00	<b>Asesor Eksternal dan IPPD</b>
4	<i>ISHOMA</i>	12.00 – 13.00	Kementerian PANRB
5	Penilaian Interviu Sesi III	13.00 – 15.00	<b>Asesor Eksternal dan IPPD</b>
6	Penilaian Interviu Sesi IV	15.00 – 17.00	<b>Asesor Eksternal dan IPPD</b>
7	Penutupan	17.00 – 17.10	Kementerian PANRB

## JADWAL PELAKSANAAN PENILAIAN INTERVIU EVALUASI SPBE TAHUN 2023

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
Senin, 11 September 2023	Sesi I 08.00 – 10.00	R1	Kota Tual
		R2	Kota Mataram
		R3	Kab. Penajam Paser Utara
		R4	Kab. Langkat
		R5	Kab. Tanah Bumbu
		R6	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
		R7	Kab. Tulang Bawang Barat
		R8	Kota Magelang
		R9	Kab. Hulu Sungai Utara
		R10	Kab. Musi Rawas
		R11	Kab. Gorontalo Utara
		R12	Kab. Mamuju
	Sesi II 10.00 – 12.00	R1	Kab. Kupang
		R2	Kota Kendari
		R3	Kab. Kutai Timur
		R4	Kab. Balangan
		R5	Kab. Tabalong
		R6	Prov. Kalimantan Selatan
		R7	Kota Sawahlunto
		R8	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
		R9	Kab. Boyolali

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R10	Kab. Purbalingga
		R11	Kab. Sintang
		R12	Kota Surabaya
	Sesi III 13.00 – 15.00	R1	Prov. Kalimantan Utara
		R2	Kab. Kolaka
		R3	Kab. Serang
		R4	Kab. Kuantan Singigi
		R5	Kota Banjarmasin
		R6	Kab. Garut
		R7	Kab. Pringsewu
		R8	Kab. Pekalongan
		R9	Kab. Indragiri Hilir
		R10	Kab. Banyuasin
		R11	Kab. Pasangkayu
		R12	Kab. Ketapang
	Sesi IV 15.00 – 17.00	R1	Kab. Katingan
		R2	Kab. Lebak
		R3	Kab. Bangka Tengah
		R4	Kab. Samosir
		R5	Arsip Nasional RI
		R6	Kab. Ciamis
		R7	Kota Padang Panjang
		R8	Kab. Gunung Kidul
		R9	Kab. Wonogiri

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R10	Kota Semarang
		R11	Kab. Melawi
		R12	Kab. Lamongan
Selasa, 12 September 2023	Sesi I 08.00 – 10.00	R1	Kab. Rote Ndao
		R2	Badan Pengawas Pemilu
		R3	Kab. Bangka
		R4	Kab. Banggai Kepulauan
		R5	Kab. Banggai Laut
		R6	Kota Sukabumi
		R7	Kementerian Investasi/BKPM
		R8	Kab. Muaro Jambi
		R9	Kab. Klaten
		R10	Kementerian Perindustrian
		R11	Kab. Mamasa
		R12	Kab. Sanggau
		R13	Kota Bogor
	Sesi II 10.00 – 12.00	R1	Kementerian Sekretariat Negara
		R2	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
		R3	Kota Tangerang Selatan
		R4	Kab. Labuhanbatu Selatan
		R5	Kab. Morowali Utara
		R6	Kab. Lampung Timur
		R7	Lembaga Ketahanan Nasional

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R8	Kab. Temanggung
		R9	Kantor Staf Presiden
		R10	Kota Pagar Alam
		R11	Kab. Karimun
		R12	Kab. Kepulauan Anambas
		R13	Kab. Bandung Barat
	<b>Sesi III</b> 13.00 – 15.00	R1	Kab. Lamandau
		R2	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
		R3	Kab. Pandeglang
		R4	Kab. Purwakarta
		R5	Kab. Humbang Hasundutan
		R6	Kab. Bandung
		R7	Kab. Padang Pariaman
		R8	Prov. DKI Jakarta
		R9	Kab. Pati
		R10	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
		R11	Kota Malang
		R12	Badan Pemeriksa Keuangan
		R13	Kota Bandung
	<b>Sesi IV</b> 15.00 – 17.00	R1	Prov. Bengkulu
		R2	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		R3	Kab. Rejang Lebong
		R5	Kota Tebing Tinggi

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R6	Kab. Pesawaran
		R7	Kota Pariaman
		R8	Kab. Tebo
		R9	Kab. Purworejo
		R10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
		R11	Kab. Kediri
		R12	Kab. Probolinggo
<b>Rabu, 13 September 2023</b>	<b>Sesi I</b> 08.00 – 10.00	R1	Kab. Ngada
		R2	Kab. Buton Tengah
		R3	Kab. Buol
		R4	Kab. Kotabaru
		R5	Kab. Halmahera Selatan
		R6	Kab. Sumba Barat
		R7	Kab. Bantaeng
		R8	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
		R9	Prov. Jawa Tengah
		R10	Kab. Kulonprogo
		R11	Kab. Pohuwato
		R12	Kab. Belitung
	<b>Sesi II</b> 10.00 – 12.00	R1	Prov. Nusa Tenggara Timur
		R2	Kab. Jayapura
		R3	Kab. Morowali
		R4	Kab. Barito Kuala
		R5	Kab. Kepulauan Sula

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R6	Kab. Malaka
		R7	Kab. Pinrang
		R8	Perpustakaan Nasional RI
		R9	Kab. Minahasa
		R10	Badan Keamanan Laut
		R11	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
		R12	Prov. Kalimantan Timur
	<b>Sesi III</b> 13.00 – 15.00	R1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		R2	Kab. Kutai Kartanegara
		R3	Prov. Banten
		R4	Kab. Karo
		R5	Kab. Dompu
		R6	Kota Tarakan
		R7	Kota Padang
		R8	Kementerian Keuangan
		R9	Kab. Ogan Komering Ulu
		R10	Kota Sungai Penuh
		R11	Kab. Sampang
		R12	Kab. Landak
	<b>Sesi IV</b> 15.00 – 17.00	R1	Kab. Barito Selatan
		R2	Komisi Kejaksaan
		R3	Kab. Bengkulu Tengah
		R4	Kota Medan
		R5	Kab. Sumbawa Barat



Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R6	Kab. Murung Raya
		R7	Kota Solok
		R8	Kementerian Pertanian
		R9	Prov. Sumatera Selatan
		R10	Kota Yogyakarta
		R11	Kota Singkawang
		R12	Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Kamis, 14 September 2023	Sesi I 08.00 – 10.00	R1	Kab. Lembata
		R2	Kab. Halmahera Utara
		R3	Prov. Papua
		R4	Kab. Poso
		R5	Kota Gunung Sitoli
		R6	Prov. Maluku
		R7	Kab. Jeneponto
		R8	Kota Surakarta
		R9	Kab. Bolaang Mongondow
		R10	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		R11	Kab. Mamuju Tengah
		R12	Kab. Mandailing Natal
	Sesi II 10.00 – 12.00	R1	Kab. Sukamara
		R2	Kab. Halmahera Timur
		R3	Kab. Bombana
		R4	Kab. Sigi
		R5	Kab. Serdang Bedagai

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R6	Kab. Sabu Raijua
		R7	Kota Pare Pare
		R8	Kab. Gowa
		R9	Kementerian Kesehatan
		R10	Komisi Yudisial
		R11	Kab. Bengkayang
		R12	Kab. Mempawah
	<b>Sesi III</b> 13.00 – 15.00	R1	Kab. Kotawaringin Timur
		R2	Komisi Aparatur Sipil Negara
		R3	Konsil Kedokteran Indonesia
		R4	Kab. Banggai
		R5	Kab. Batu Bara
		R6	Kab. Lombok Barat
		R7	Kota Payakumbuh
		R8	Kab. Tana Toraja
		R9	Kab. Siak
		R10	Kab. Sragen
		R11	Kab. Gorontalo
		R12	Kementerian Hukum dan Ham
	<b>Sesi IV</b> 15.00 – 17.00	R1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		R2	Lembaga Sensor Film
		R3	Kab. Buton Selatan
		R4	Kota Binjai
		R5	Kab. Padang Lawas Utara

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R6	Kota Serang
		R7	Kab. Sijunjung
		R8	Kota Langsa
		R9	Badan Standardisasi Nasional
		R10	Prov. Jambi
		R11	Kota Kediri
		R12	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumat, 15 September 2023	Sesi I 08.00 – 10.00	R1	Kab. Seruyan
		R2	Kota Tangerang
		R3	Kab. Konawe Utara
		R4	Kota Pematang Siantar
		R5	Kementerian Perhubungan
		R7	Kab. Sidenreng Rappang
		R8	Kab. Teluk Wondama
		R9	Kab. Tapin
		R10	Dewan Perwakilan Daerah
		R11	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
		R12	Kab. Gresik
		R13	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Sesi II 13.00 – 15.00	R1	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		R2	Kab. Bengkulu Selatan
		R3	Kab. Mahakam Ulu
		R4	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
		R5	Badan Kepegawaian Negara

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R6	Kota Banjar
		R7	Kota Makassar
		R8	Kab. Kepulauan Mentawai
		R9	Kab. Bantul
		R10	Kota Palembang
		R11	Kab. Bangkalan
		R12	Kota Dumai
		R13	Kab. Manggarai
	Sesi III 15.00 – 17.00	R1	Dewan Ketahanan Nasional
		R2	Kota Bengkulu
		R3	Kota Baubau
		R4	Dewan Pers
		R5	Kementerian Dalam Negeri
		R6	Kab. Solok Selatan
		R7	Kab. Sukabumi
		R8	Kab. Bekasi
		R9	Kab. Kepulauan Meranti
		R10	Pemerintah D.I. Yogyakarta
		R11	Kab. Kubu Raya
		R12	Kab. Bondowoso
		R13	Kota Palangkaraya
Senin, 18 September 2023	Sesi I 08.00 – 10.00	R1	Kota Ambon
		R2	Prov. Nusa Tenggara Barat
		R3	Kab. Pulau Taliabu

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R4	Kab. Tapanuli Utara
		R5	Kab. Pakpak Bharat
		R6	Kab. Luwu
		R7	Kab. Sorong
		R8	Kab. Manokwari
		R9	Kab. Kendal
		R10	Kab. Musi Banyuasin
		R11	Kota Probolinggo
		R12	Badan Pengusahaan Sabang
	<b>Sesi II</b> 10.00 - 12.00	R1	Kab. Buru
		R2	Kab. Kepahiang
		R3	Kab. Sumbawa
		R4	Kab. Sumedang
		R5	Kab. Deli Serdang
		R6	Kab. Mesuji
		R7	Kab. Barru
		R8	Kab. Toraja Utara
		R9	Kab. Padang Lawas
		R10	Kab. Kebumen
		R11	Kab. Sambas
		R12	Kab. Lingga
	<b>Sesi III</b> 13.00 - 15.00	R1	Kab. Barito Timur
		R2	Kota Bontang
		R3	Kota Cilegon

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R4	Kab. Labuhanbatu
		R5	Kab. Hulu Sungai Selatan
		R6	Kab. Sinjai
		R7	Kab. Bone
		R8	Kab. Lampung Selatan
		R9	Kab. Tegal
		R10	Kab. Jepara
		R11	Kab. Sekadau
		R12	Kab. Ngawi
	<b>Sesi IV</b> 15.00 – 17.00	R1	Kota Batam
		R2	Kab. Bangka Barat
		R3	Kota Pangkal Pinang
		R4	Kota Pekanbaru
		R5	Prov. Sumatera Utara
		R6	Kementerian Luar Negeri
		R7	Kota Cimahi
		R8	Kota Bandar Lampung
		R9	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
		R10	Kota Jambi
		R11	Kab. Ponorogo
		R12	Kab. Bintan
<b>Selasa,</b> <b>19 September 2023</b>	<b>Sesi I</b> 08.00 – 10.00	R1	Kab. Manggarai Barat
		R2	Kab. Jombang
		R3	Kab. Lombok Utara

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R4	Kementerian Komunikasi dan Informatika
		R6	Kab. Kepulauan Selayar
		R7	Kab. Luwu Timur
		R8	Kab. Fakfak
		R9	Kab. Kepulauan Talaud
		R10	Kab. Sarolangun
		R11	Kab. Pacitan
		R12	Kab. Magetan
	<b>Sesi II</b> 10.00 – 12.00	R1	Kota Kupang
		R2	Kab. Tanah Laut
		R3	Kab. Lombok Tengah
		R4	Prov. Sulawesi Tengah
		R5	Kab. Banjar
		R6	Kab. Bogor
		R7	Kab. Cianjur
		R8	Kab. Aceh Barat Daya
		R9	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
		R10	Kab. Magelang
		R11	Kab. Bangli
		R12	Kota Pasuruan
	<b>Sesi III</b> 13.00 – 15.00	R1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		R2	Badan Pusat Statistik
		R3	Kab. Belitung Timur
		R4	Badan Pembina Ideologi Pancasila

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R5	Kab. Nias
		R6	Kab. Nagan Raya
		R7	Kab. Agam
		R8	Kab. Pidie
		R9	Kab. Minahasa Tenggara
		R10	Badan Pangan Nasional
		R11	Kab. Badung
		R12	Kab. Sidoarjo
	Sesi IV 15.00 – 17.00	R1	Markas Besar Kepolisian RI
		R2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		R3	Radio Republik Indonesia
		R4	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		R5	Badan Narkotika Nasional
		R6	Kementerian Sosial
		R7	Prov. Sumatera Barat
		R8	Kab. Aceh Utara
		R9	Kab. Siau Tagulandang Biaro
		R10	Mahkamah Konstitusi
		R11	Kab. Pamekasan
		R12	Kab. Mojokerto
Rabu, 20 September 2023	Sesi I 08.00 – 10.00	R1	Kab. Sumba Timur
		R2	Kab. Wajo
		R3	Kota Samarinda
		R4	Kejaksaan Agung



Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R5	Kota Banjar Baru
		R6	Kab. Seram Bagian Barat
		R7	Kab. Pangajene Kapulauan
		R8	Kab. Aceh Singkil
		R9	Kab. Brebes
		R10	Kab. Muara Enim
		R11	Kab. Karangasem
		R12	Kota Gorontalo
	Sesi II 10.00 – 12.00	R1	Kab. Belu
		R2	Kab Pesisir Barat
		R3	Prov. Kepulauan Bangka Belitung
		R4	Kab. Soppeng
		R5	Kab. Asahan
		R6	Kab. Sikka
		R7	Kab. Solok
		R8	Kab. Aceh Selatan
		R9	Kota Lubuk Linggau
		R10	Kab. Cilacap
		R11	Kab. Bone Bolango
		R12	Kab. Jembrana
	Sesi III 13.00 – 15.00	R1	Kab. Kapuas
		R2	Kab. Maros
		R3	Kab. Bangka Selatan
		R4	Prov. Riau

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R5	Kab. Hulu Sungai Tengah
		R6	Kab. Gunung Mas
		R7	Kab. Takalar
		R8	Kab. Bireuen
		R9	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
		R10	Kab. Batang Hari
		R11	Kab. Lumajang
		R12	Kementerian Perdagangan
	Sesi IV 15.00 – 17.00	R1	Prov. Kalimantan Tengah
		R2	Komisi Pemilihan Umum
		R3	Kementerian Agama
		R4	Kota Padang Sidempuan
		R5	Kab. Indragiri Hulu
		R6	Kab. Aceh Jaya
		R7	Sekretariat Kabinet
		R8	Kab. Aceh Tengah
		R9	Kab. Semarang
		R10	Kab. Wonosobo
		R11	Kab. Kayong Utara
		R12	Prov. Kalimantan Barat
Kamis, 21 September 2023	Sesi I 08.00 – 10.00	R1	Kab. Banjarnegara
		R2	Kab. Tapanuli Selatan
		R3	Prov. Maluku Utara
		R4	Kota Ternate

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R5	Kab. Kepulauan Tanimbar
		R6	Kab. Indramayu
		R7	Kab. Aceh Timur
		R8	Kab. Manokwari Selatan
		R9	Kab. Bolaang Mongondow Timur
		R10	Kota Tegal
		R11	Kab. Gianyar
		R12	Kab. Buleleng
	<b>Sesi II</b> 10.00 – 12.00	R1	Kota Sibolga
		R2	Kementerian Ketenagakerjaan
		R3	Kab. Konawe Selatan
		R4	Kota Palu
		R5	Kab. Malinau
		R6	Kab. Bulukumba
		R7	Kab. Simeulue
		R8	Kab. Gayo Luwes
		R9	Kota Kotamobagu
		R10	Kab. Karanganyar
		R11	Kab. Trenggalek
		R12	Kab. Pasuruan
	<b>Sesi III</b> 13.00 – 15.00	R1	Badan Informasi Geospasial
		R2	Kota Balikpapan
		R3	Televisi Republik Indonesia
		R4	Kab. Bengkalis

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R5	Kab. Pulang Pisau
		R6	Kab. Kuningan
		R7	Kab. Tasikmalaya
		R8	Kab. Tanggamus
		R9	Kab. Blora
		R10	Kab. Kudus
		R11	Kab. Situbondo
		R12	Kota Blitar
	Sesi IV 15.00 – 17.00	R2	Kab. Tangerang
		R3	Kab. Kaur
		R4	Kab. Tapanuli Tengah
		R5	Kab. Labuhan Batu Utara
		R6	Kementerian Koperasi dan UKM
		R8	Kota Sabang
		R9	Kab. Ogan Komering Ilir
		R10	Kab. Sukoharjo
		R11	Kab. Jember
		R12	Kab. Kapuas Hulu
	Sesi I 08.00 – 10.00	R1	Prov. Kepulauan Riau
		R3	Kab. Toli Toli
		R4	Kab. Kutai Barat
		R5	Kab. Bulungan
		R6	Dewan Perwakilan Rakyat
		R7	Kab. Luwu Utara
Jumat, 22 September 2023			

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R8	Kab. Seluma
		R9	Kab. Pematang Jaya
		R10	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		R11	Prov. Sulawesi Barat
		R12	Kab. Klungkung
	Sesi II 13.00 – 15.00	R1	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		R2	Badan Pengusahaan Batam
		R3	Kota Tanjung Balai
		R4	Kab. Kolaka Utara
		R5	Kab. Flores Timur
		R6	Prov. Jawa Barat
		R7	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
		R8	Kab. Lebong
		R9	Prov. Sulawesi Utara
		R10	Kab. Demak
		R11	Prov. Gorontalo
		R12	Badan Pengawas Obat dan Makanan
	Sesi III 15.00 – 17.00	R1	Kab. Kotawaringin Barat
		R2	Kab. Muko Muko
		R3	Kab. Toba
		R4	Kab. Berau
		R5	Kota Tanjung Pinang
		R6	Ombudsman RI
		R7	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R8	Kab. Paser
		R9	Kab. Banyumas
		R10	Kab. Sleman
		R11	Kab. Natuna
		R12	Kab. Bojonegoro
Senin, 25 September 2023	Sesi I 08.00 – 10.00	R1	Kab. Timor Tengah Utara
		R2	Kab. Mimika
		R3	Kab. Kampar
		R4	Kota Tidore Kepulauan
		R5	Kab Tulang Bawang
		R6	Kota Depok
		R7	Kab. Pangandaran
		R8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
		R9	Kab. Lahat
		R10	Kab. Kepulauan Sangihe
		R11	Kab. Boalemo
		R12	Dewan Jaminan Sosial Nasional
	Sesi II 10.00 – 12.00	R1	Kab. Timor Tengah Selatan
		R2	Kab. Keerom
		R3	Kab. Donggala
		R4	Kab. Jayawijaya
		R5	Pemerintah Aceh
		R6	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		R7	Kota Bukittinggi

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R8	Kab. Limapuluh Kota
		R9	Kab. Grobogan
		R10	Kab. Merangin
		R11	Komisi Penyiaran Indonesia
		R12	Kab. Polewali Mandar
	<b>Sesi III</b> 13.00 – 15.00	R1	Kab. Nagekeo
		R2	Kab. Bengkulu Utara
		R3	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
		R4	Kab. Buton
		R5	Kab. Way Kanan
		R6	Kota Cirebon
		R7	Kab. Bener Meriah
		R8	Kab. Tanah Datar
		R9	Kab. Banyuwangi
		R10	Kota Bitung
		R11	Komisi Pemberantasan Korupsi
		R12	Kab. Sumenep
	<b>Sesi IV</b> 15.00 – 17.00	R1	Kab. Barito Utara
		R3	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
		R4	Prov. Sulawesi Tenggara
		R5	Kab. Aceh Tamiang
		R6	Kab. Cirebon
		R7	Kab. Dharmasraya
		R8	Kota Metro

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
Selasa, 26 September 2023		R9	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		R10	Kab. Ogan Ilir
		R11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Sesi I 08.00 – 10.00	R1	Kab. Maluku Barat Daya
		R2	Kab. Ende
		R3	Kota Denpasar
		R4	Kab. Konawe
		R5	Kab. Puncak Jaya
		R6	Kota Tasikmalaya
		R7	Prov. Papua Barat
		R8	Kota Banda Aceh
		R9	Kota Pekalongan
		R10	Kab. Minahasa Utara
		R11	Badan Siber dan Sandi Negara
		R12	Prov. Bali
	Sesi II 10.00 – 12.00	R1	Kab. Sumba Tengah
		R2	Kab. Alor
		R3	Lembaga Administrasi Negara
		R4	Kab. Wakatobi
		R5	Kota Jayapura
		R6	Kota Bekasi
		R7	Kota Palopo
		R8	Kab. Lampung Barat
		R9	Badan Pengawasan Tenaga Nuklir



Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R10	Kab. Tanjung Jabung Barat
		R11	Kementerian Pertahanan
		R12	Kab. Nganjuk
	Sesi III 13.00 – 15.00	R2	Kab.Manggarai Timur
		R3	Kota Mojokerto
		R4	Kab. Lombok Timur
		R5	Kab. Karawang
		R6	Kab. Subang
		R7	Prov. Lampung
		R8	Majelis Permusyawaratan Rakyat
		R9	Kota Salatiga
		R10	Kab. Tomohon
		R11	Prov. Jawa Timur
		R12	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
	Sesi IV 15.00 – 17.00	R2	Kab. Sumba Barat Daya
		R3	Kab. Tuban
		R4	Kab. Buton Utara
		R5	Mahkamah Agung
		R6	Kab. Pasaman Barat
		R7	Kab. Pesisir Selatan
		R8	Kab. Lampung Utara
		R9	Kab. Rembang
		R10	Kab. Bungo
		R11	Kab. Blitar

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
		R12	Kab. Malang
Rabu, 27 September 2023	Sesi I 08.00 – 10.00	R1	Prov. Sulawesi Selatan
		R2	Kab. Maluku Tenggara
		R3	Kab. Madiun
		R4	Kab. Muna Barat
		R5	Kab. Batang
		R6	Kab. Tulungagung
	Sesi II 10.00 – 12.00	R1	Kab. Enrekang
		R2	Kab. Maluku Tengah
		R3	Kab. Tabanan
		R4	Kota Bima
		R5	Kab. Rokan Hilir
		R6	Kab. Majene
	Sesi III 13.00 – 15.00	R1	Kab. Majalengka
		R2	Kab. Nunukan
		R3	Kota Madiun
		R4	Kab. Bima
		R6	Kota Batu
	Sesi IV 15.00 – 17.00	R1	Kab. Lampung Tengah
		R2	Kab. Tana Tidung
		R3	Kota Pontianak
		R4	Kab. Konawe Kepulauan
		R6	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
Jumat, 29 September 2023	Sesi I 08.00 – 10.00	R1	Kota Manado
	Sesi II 13.00 – 15.00	R1	Kab. Empat Lawang
	Sesi III 15.00 – 17.00	R1	Kota Prabumulih

### Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Interview Evaluasi SPBE Tahun 2023

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penilaian interview, setiap perwakilan K/L/D **diwajibkan mengisi konfirmasi** kehadiran melalui <https://konfirmasi.menpan.go.id/index.php/event/342> (**paling lambat 4 hari** sebelum pelaksanaan jadwal interview masing-masing Instansi dimulai tanggal 6 September 2023).
2. Kegiatan Penilaian Interview Evaluasi SPBE Tahun 2023 akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi video conference (Zoom). ID Meeting dan Password akan dikirimkan melalui email masing-masing dengan melakukan registrasi pada link berikut: <https://s.id/InterviewEvalSPBE2023>.
3. Untuk memudahkan identifikasi dan alokasi sesuai ruangnya, Perwakilan IPPD wajib mengikuti ketentuan penamaan pada identitas zoomnya sebagai berikut:  
Kode Ruang – Nama Instansi – Nama Perwakilan (*contoh: R2-K.PANRB-Bella*)
4. Jika diperlukan, Perwakilan K/L/Pemda dapat masuk ke ruang Zoom menggunakan **maksimal 10 (sepuluh) akun** dengan mengikuti ketentuan pelaksanaan dan tata tertib dalam pelaksanaan penilaian interview agar kegiatan dapat berjalan efektif dan kondusif.
5. Alokasi waktu penilaian interview **maksimal 2 (dua) jam** untuk masing-masing IPPD, sehingga diharapkan Perwakilan IPPD diharapkan sudah memasuki ruang *virtual meeting* (Zoom) 15 (lima belas) menit sebelum jadwal masing-masing IPPD untuk memastikan pelaksanaan penilaian interview dapat berjalan tepat waktu.
6. Dalam pelaksanaan kegiatan penilaian interview ini, akan dilakukan klarifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Asesor Eksternal Kementerian PANRB terhadap bukti dukung yang telah disampaikan oleh IPPD melalui Aplikasi Evaluasi SPBE sebagai hasil Penilaian Mandiri. Untuk itu, masing-masing perwakilan IPPD diharapkan sudah mempersiapkan seluruh bukti dukung dalam bentuk *softcopy* yang dapat diperlihatkan melalui fitur *share screen* pada Zoom masing-masing.
7. Dalam hal perlu menambahkan data dukung pada masing-masing indikator setelah mendapatkan persetujuan Asesor Eksternal, perwakilan IPPD dapat mengunggah bukti dukung tambahan tersebut pada fitur aplikasi <https://tauval.spbe.go.id> dengan menggunakan *username* dan *password* yang sama seperti kegiatan Penilaian Mandiri SPBE, dengan ketentuan batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Asesor Eksternal.
8. Untuk informasi lebih lanjut, Perwakilan IPPD dapat menghubungi Tim Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE di nomor 021 7398381 – 89 ext 2111, dan/atau kontak berikut:
  - Arman Kurniawan (0852-2119-8920) untuk **Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota**;
  - Muthia Nur (0857-7310-1473) untuk Narahubung **Pemerintah Kabupaten di area Jawa, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara**;
  - Eka Bella (0895-3602-81347) untuk Narahubung **Pemerintah Kabupaten di area Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Papua Barat**; dan
  - Iksan Ramadhan (0897-9664-258) untuk **Helpdesk Aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE**.